

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pelaksanaan demokrasi yang berkualitas memerlukan mekanisme pengawasan yang kuat agar proses pemilihan umum berlangsung adil, transparan, dan akuntabel. Di Indonesia, lembaga yang diberi mandat tersebut adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai institusi independen pengawas pemilu.

Bawaslu memiliki peran strategis dalam menegakkan aturan pemilu dari awal hingga akhir, termasuk pencegahan dan penanganan pelanggaran. Keberhasilan tugas ini sangat bergantung pada kinerja pegawainya. Kinerja pegawai merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor, baik internal individu maupun eksternal organisasi. Dalam konteks penelitian organisasi, kinerja umumnya dipengaruhi oleh persepsi dukungan organisasi, dukungan sosial, dan kondisi pekerjaan yang diterima pegawai.

Dalam birokrasi publik seperti Bawaslu, tekanan politik sering muncul dari aktor eksternal yang memiliki kepentingan dalam proses pengawasan pemilu. Dinamika politik seperti ini berpotensi mengintervensi independensi lembaga dan memengaruhi kualitas kinerja pegawai.

Tekanan politik pada pegawai pengawas bisa berbentuk permintaan intervensi, tekanan untuk berpihak, atau intimidasi oleh kelompok kepentingan politik. Hal ini berpotensi mengganggu netralitas, profesionalisme, dan integritas kerja pegawai.

Penelitian tentang tekanan politik di lingkungan lembaga pemerintahan menunjukkan bahwa persepsi adanya pengaruh eksternal cenderung menurunkan kinerja pegawai karena munculnya konflik nilai antara tugas profesional dan tekanan eksternal. Konteks ini relevan dengan situasi pegawai Bawaslu.

Di sisi lain, dukungan organisasi dalam bentuk pelatihan, sumber daya, insentif, dan kejelasan peran dipandang penting dalam meningkatkan kinerja pegawai. Literature metaanalisis hubungan dukungan organisasi dengan kinerja menemukan hubungan positif yang substansial di berbagai konteks organisasi.

Perceived Organizational Support (POS) secara teoritis merupakan sejauh mana pegawai merasa organisasi menghargai kontribusi dan peduli terhadap kesejahteraan mereka. Persepsi ini menurut teori dukungan organisasi akan meningkatkan motivasi kerja, komitmen, dan kinerja pegawai.

Namun dalam konteks tekanan politik, dukungan organisasi saja tidak selalu cukup untuk menjamin kinerja optimal. Karyawan atau pegawai harus memiliki kapasitas internal untuk memilih tindakan yang sesuai nilai profesional meski berada di bawah tekanan.

Moral courage (keberanian moral) adalah konsep yang memuat kemampuan seorang individu untuk bertindak sesuai prinsip etika meskipun menghadapi risiko negatif, seperti tekanan sosial atau politik, kehilangan karier, atau sanksi dari pihak berkuasa.

Secara konseptual, moral courage merupakan dimensi moral dan psikologis yang membantu individu untuk mempertahankan integritas dalam situasi dilematik

yang penuh tekanan. Moral courage dilihat sebagai keterampilan non-teknis penting di lingkungan profesional yang kompleks.

Studi dalam konteks organisasi kesehatan menunjukkan moral courage memungkinkan profesional untuk tetap memutuskan berdasarkan etika meskipun menghadapi hambatan organisasi dan tekanan sosial. Hal ini menunjukkan karakter moral courage yang relevan untuk konteks pegawai Bawaslu yang harus memutuskan secara netral.

Penelitian empiris juga menunjukkan bahwa moral courage dapat berfungsi sebagai variabel mediasi, bukan hanya sebagai moderator, antara dukungan konteks organisasi dan perilaku kerja etis pegawai. Dalam penelitian keperawatan, moral courage memediasi hubungan antara faktor lingkungan dan perilaku etis pegawai.

Studi lain menunjukkan moral courage dapat menghubungkan pengaruh gaya kepemimpinan dengan perilaku pelaporan etis karyawan. Hal ini menunjukkan mekanisme di mana moral courage menerjemahkan konteks organisasi ke dalam tindakan nyata di tempat kerja. Dalam organisasi publik seperti Bawaslu, moral courage menjadi sumber daya pribadi yang penting karena pegawai sering menghadapi dilema antara menegakkan aturan dan tekanan pihak eksternal, termasuk kekuatan politik.

Ketika moral courage tinggi, pegawai cenderung menolak pengaruh tekanan politik yang tidak sesuai profesionalisme dan tetap menjalankan tugas sesuai ketentuan organisasi. Ini secara teoritis memperkuat hubungan antara dukungan organisasi dan kinerja pegawai. Secara praktis, moral courage juga berkaitan erat dengan budaya organisasi etis dan iklim organisasi yang mendukung tindakan

moral. Organisasi yang mengembangkan moral courage cenderung memiliki pegawai yang lebih konsisten dalam kinerja mereka meskipun berada di bawah tekanan eksternal.

Dalam kajian Bawaslu di berbagai wilayah Indonesia, beberapa penelitian terjadi fokus pada pengendalian internal dan self-esteem pegawai, tetapi masih jarang yang mengkaji mekanisme moral courage sebagai jembatan antara tekanan politik, dukungan organisasi, dan kinerja pegawai.

Kesenjangan ini menunjukkan adanya research gap yang signifikan, sehingga diperlukan penelitian yang mengintegrasikan moral courage sebagai konstruktif yang dapat menjelaskan bagaimana pegawai mempertahankan kinerja dalam menghadapi tekanan politik dan merespon dukungan organisasi.

Oleh karena itu, penelitian ini membahas peran moral courage sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara tekanan politik, dukungan organisasi, dan kinerja pegawai Bawaslu di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dengan harapan dapat memberikan kontribusi empiris dan konseptual bagi studi organisasi publik dan manajemen sumber daya manusia di lembaga pengawasan pemilu.

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, penelitian ini difokuskan pada pengaruh tekanan politik dan dukungan organisasi terhadap kinerja pegawai Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dengan moral courage sebagai variabel mediasi. Rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tekanan politik terhadap kinerja pegawai Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan?

2. Bagaimana pengaruh dukungan organisasi terhadap kinerja pegawai Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan?
3. Bagaimana peran moral courage sebagai variabel mediasi dalam pengaruh tekanan politik terhadap kinerja pegawai Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan?
4. Bagaimana peran moral courage sebagai variabel mediasi dalam pengaruh dukungan organisasi terhadap kinerja pegawai Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan?
5. Bagaimana pengaruh simultan tekanan politik dan dukungan organisasi terhadap kinerja pegawai Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui moral courage?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tekanan politik dan dukungan organisasi terhadap kinerja pegawai Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dengan moral courage sebagai variabel mediasi. Secara rinci, tujuan penelitian adalah:

1. Mengetahui pengaruh tekanan politik terhadap kinerja pegawai Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Mengetahui pengaruh dukungan organisasi terhadap kinerja pegawai Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
3. Menganalisis peran moral courage sebagai variabel mediasi dalam pengaruh tekanan politik terhadap kinerja pegawai.

4. Menganalisis peran moral courage sebagai variabel mediasi dalam pengaruh dukungan organisasi terhadap kinerja pegawai.
5. Mengetahui pengaruh simultan tekanan politik dan dukungan organisasi terhadap kinerja pegawai melalui moral courage.

#### **1.4 Manfaat penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

1. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu manajemen sumber daya manusia (SDM) di sektor publik, khususnya terkait kinerja pegawai pengawas pemilu.
2. Menambah literatur mengenai peran moral courage sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara tekanan politik, dukungan organisasi, dan kinerja pegawai.
3. Memperkaya studi tentang pengaruh faktor eksternal dan internal organisasi terhadap kinerja pegawai, sehingga memberikan dasar teoritis untuk penelitian lanjutan.
4. Membantu menguatkan teori Perceived Organizational Support (POS) dan teori moral courage dalam konteks lembaga pengawas pemilu di Indonesia.
5. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait mekanisme mediasi psikologis dalam meningkatkan kinerja pegawai di organisasi publik yang menghadapi tekanan politik.

## **2. Manfaat Praktis**

1. Memberikan rekomendasi bagi Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam meningkatkan kinerja pegawai melalui pengembangan moral courage dan dukungan organisasi.
2. Membantu manajemen Bawaslu merancang strategi penguatan integritas dan profesionalisme pegawai, terutama dalam menghadapi tekanan politik.
3. Menjadi dasar untuk penyusunan kebijakan internal terkait pelatihan, mentoring, dan dukungan organisasi bagi pegawai.
4. Memberikan masukan bagi pengembangan program pelatihan moral courage agar pegawai mampu menahan tekanan politik tanpa menurunkan kualitas pengawasan pemilu.
5. Menjadi sumber informasi bagi peneliti, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam memahami dinamika kinerja pegawai di lembaga pengawasan pemilu di daerah.